

Kesultanan di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (Studi tentang Pemaknaan Masyarakat terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)

Meyrza Ashrie Tristyana*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pemaknaan terhadap eksistensi kesultanan di Yogyakarta oleh masyarakat pluralistik di daerah tersebut yang tidak hanya membawa implikasi pada pluralitas masyarakat itu sendiri, melainkan juga pada keseluruhan bagian dari Yogyakarta, termasuk kesultanan dan pemerintahan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan secara fenomenologis. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengenal lebih dalam subyek yang diteliti dan mengetahui fenomena-fenomena apa yang terjadi pada subyek penelitian. Sedangkan pendekatan fenomenologi yang digunakan, dimaksudkan peneliti untuk mendeskripsikan makna yang didapat dari subyek penelitian ketika memaknai obyek penelitian. Dari temuan data yang didapatkan, pemaknaan dari para informan dalam memaknai eksistensi kesultanan yang telah dipetakan menjadi masyarakat asli dan pendatang adalah beragam atau fragmented. Namun untuk pemaknaan di dalam masyarakat asli dan masyarakat pendatang terhadap kesultanan jika dipisahkan sendiri-sendiri merupakan pemaknaan yang homogen. Para informan memaknai kesultanan sebagai institusi yang bersifat primer, terutama di bidang kebudayaan.

Kata Kunci: pemaknaan, masyarakat pluralistik, fenomenologi.

ABSTRACT

This research is talking about pluralistic society that eventually form an independent definition of the Sultanate's existence of Yogyakarta. The meaning of the Sultanate's existence in Yogyakarta not only carries the implication on the plurality of society itself, but also on the overall part of the Yogyakarta, including Sultanate and Government. This research is a qualitative research type and using a phenomenological approach. Qualitative research is intended to get to know more deeply the subject researched phenomena and to know what happened to the subjects of research. While the approach used, the phenomenology is intended to describe the meaning of researchers obtained from research subjects when we contemplate the object of research. From the findings of the data obtained from the informant, the definition in the Sultanate have existence we contemplate the mapped to native communities and newcomers are diverse or fragmented. However, for the definition of indigenous communities and peoples against the entrant if separated individually is the definition of homogeneity. The informants interpret the Sultanate as a primary institution, especially in the field of culture.

Keywords: meaning, pluralistic societies, phenomenology.

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: meyrzashrie@yahoo.com

I. Pendahuluan

a. Permasalahan

Penelitian ini adalah pemaknaan masyarakat Yogyakarta terhadap kesultanan sebagai pihak yang berkuasa di daerahnya. Dalam menjelaskan pemaknaan tersebut, yang hendak dilihat pertama adalah bagaimana interpretasi masyarakat terhadap kesultanan yang berkuasa di daerah mereka. Dan yang kedua adalah apa yang melatarbelakangi pemaknaan tersebut. Alasan-alasan setiap individu dapat berbeda, tergantung latar belakang mereka masing-masing. Sedangkan untuk menggali informasi ini, penelitian dilakukan ke masyarakat Yogyakarta secara langsung.

Menjaga stabilitas di daerah yang masyarakatnya bersifat plural tidaklah mudah. Karena pluralitas sering menjadi akar instabilitas kondisi daerah tersebut. Konflik bernuansa SARA di beberapa daerah seolah mencitrakan bahwa daerah yang penduduknya plural dan beragam selalu melahirkan konflik. Tetapi ternyata anggapan seperti itu ditepis oleh Yogyakarta. Dalam sejarahnya, Yogyakarta dikenal sebagai kota yang damai. Perselisihan berbau SARA di tempat ini tidak berlaku. Padahal penduduk yang berdomisili di Yogyakarta terdiri dari berbagai macam etnis, suku, ras, agama bahkan antar warga negara yang saling berbeda.

Pluralitas masyarakat di Yogyakarta dapat tumbuh secara harmonis dan dinamis dalam satu bingkai persaudaran yang saling menghargai satu sama lain. Di Yogyakarta memang terdapat persekutuan-persekutuan atau organisasi kelompok bernuansa golongan. Dalam perhimpunan-perhimpunan tersebut mereka memiliki program-program untuk pemberdayaan dan kepentingan anggotanya masing-masing. Tetapi justru dengan organisasi tersebut, komunikasi antar kelompok malah dapat terfasilitasi lewat program-program dan kerjasama di antara mereka.

Di saat yang sama, kesultanan di Yogyakarta berkuasa dengan caranya sendiri untuk dapat mempertahankan sikap toleransi di antara masyarakatnya misalnya, dengan menggunakan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan ciri khas kepemimpinan para Sultan di Yogyakarta. visi-visi, kebijakan-kebijakan, dan pengambilan keputusan-keputusan merupakan hasil pergumulan rohani yang dalam. Kiranya, pemimpin Yogyakarta dan

Indonesia masa depan juga memperhatikan aspek spiritual ini. Tidak hanya mengedepankan pemikiran egoistik dan primordialistik, kepentingan politis, dan keuntungan ekonomi. Pemimpin harus mencari kehendak Tuhan sebelum memutuskan sesuatu demi kebaikan segenap umat.

Kini, pluralitas masyarakat di Yogyakarta berkembang dengan sangat pesat karena banyaknya pendatang dari luar daerah. Masyarakat yang plural, identik dengan demokrasi. Namun banyak pihak di luar Yogyakarta yang lebih menuntut demokrasi daripada rakyatnya sendiri. Justru masyarakat Yogyakarta menganggap sultan adalah sosok pemimpin yang demokratis.

Berarti, kehendak rakyat Yogyakarta adalah tetap dipimpin Sultan. Kehendak rakyat Yogyakarta agar segala sesuatu yang membuat Yogyakarta istimewa tetap dipertahankan, selain faktor sejarah. Kehendak rakyat jika monarki itu tetap ada. Hal itu tak lain karena monarki yang ada di Yogyakarta adalah bukan monarki absolut yang sama sekali tidak melibatkan rakyat. Monarki di Yogyakarta adalah monarki terbatas. Monarki kultural.

Pemaknaan dari masyarakat Yogyakarta ini tentu dapat menyibak alasan mengapa mempertahankan keistimewaan Yogyakarta, bagi yang berada di kubu pro, dan menolak keistimewaan Yogyakarta yang masih kental dengan unsur monarki, bagi yang berada di kubu kontra. Ini sangat menentukan bagaimana stabilitas dapat terjalin dan bagaimana UU Keistimewaan Yogyakarta dapat bertahan ditengah pluralitas masyarakat yang semakin berkembang dan besarnya tuntutan demokrasi di Indonesia, seperti di daerah selain Yogyakarta.

Berpijak pada berbagai faktor tersebut, rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah tentang apa makna 'kesultanan' bagi masyarakat Yogyakarta, apa yang melatarbelakangi pemaknaan kesultanan bagi masyarakat tersebut, dan apa implikasi pemaknaan kesultanan Yogyakarta oleh masyarakat terhadap keberlangsungan pluralitas masyarakat di Yogyakarta. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut juga diperlukan adanya interpretasi data yang dihubungkan dengan teori.

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

menggambarkan masyarakat Yogyakarta dari berbagai kelompok memaknai kesultanan pada saat ini, serta alasan dan hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat dari berbagai kelompok di Yogyakarta dalam memaknai kesultanan tersebut, dan juga untuk memahami kondisi masyarakat pluralistik di Yogyakarta saat ini dan di masa mendatang.

c. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi dan kekuasaan, yang kemudian didukung oleh konsep masyarakat.

Teori fenomenologi dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya sebagai masyarakat Yogyakarta. Karena pengertian fenomena dalam studi fenomenologi sendiri adalah pengalaman/peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek.

Sedangkan kekuasaan adalah teori yang berkaitan dengan perilaku (Ramlan Surbakti, 1992: 57). Dalam penelitian ini, kekuasaan kesultanan merupakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi perilaku masyarakat pluralistik Yogyakarta sehingga masyarakat berperilaku sesuai dengan kehendak kesultanan sebagai pihak yang mempengaruhi.

Kedua teori tersebut dihubungkan dengan konsep masyarakat. Di dalam konsep masyarakat ada norma, nilai, dan interaksi sosial yang menjadi penghubung kekuasaan kesultanan agar dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

d. Metode Penelitian

Data yang nantinya akan dihubungkan dengan teori-teori tersebut, didapat melalui metode penelitian kualitatif dan pendekatan secara fenomenologis. Tipe penelitian kualitatif ini diartikan sebagai tipe penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 1988: 6).

Sedangkan pendekatan secara

fenomenologis dipilih karena peneliti berpandangan bahwa subyek secara aktif membentuk makna melalui kehidupan (dunia) sehari-harinya. Manusia adalah makhluk yang melakukan komunikasi, interaksi, partisipasi, dan penyebab yang bertujuan. Metode fenomenologis terdiri dari pengujian terhadap apa saja yang ditemukan dalam kesadaran. Syarat utama bagi keberhasilan penggunaan metode fenomenologis adalah membebaskan diri dari praduga-praduga atau pengandaian. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 1988: 7).

e. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada ilmu-ilmu pengetahuan sosial-politik mengenai eksistensi kesultanan di Yogyakarta, pluralitas masyarakat di Yogyakarta, serta studi tentang pemaknaan masyarakat tersebut terhadap kesultanan Yogyakarta. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada peneliti lain khususnya sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya.

Pembahasan

Masyarakat asli Yogyakarta sangat terkenal dengan lemah lembut dan keramahannya. Mereka hidup dibawah kepemimpinan seorang sultan sebagai kepala daerah mereka, bukan individu terpilih secara demokratis. Namun mereka justru mempertahankan sistem pemerintahan yang mereka jalani ini, karena mereka percaya, dengan sistem seperti ini, selama ini, Yogyakarta tetaplah aman dan nyaman untuk ditinggali.

Perasaan aman dan nyaman ini terungkap melalui pemaknaan informan tentang Yogyakarta. Dalam proses pemaknaan ini, teori fenomenologi digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan jawaban. Menurut Edmund Husserl, fenomenologi adalah suatu ilmu dan metode untuk mengungkap makna terdalam (esensi) dari suatu fenomena. Manusia mampu menangkap esensi dari suatu fenomena. Esensi

dalam fenomenologi Husserl berarti kesadaran manusia akan dunia, yaitu dunia yang nampak di hadapan manusia yang telah direduksi (http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl, diakses pada 1 Desember 2012, pukul 03.55 WIB).

Berdasarkan teori fenomenologi, maka didapatkan pemaknaan dari masyarakat asli Yogyakarta tentang eksistensi kesultanan di Yogyakarta. Tingkat kenyamanan mereka tinggal di Yogyakarta ini dapat dikaitkan dengan bagaimana mereka memaknai kesultanan. Karena menurut mereka, mereka merasa nyaman dan aman tinggal di Yogyakarta dikarenakan pengaruh kesultanan yang kuat terhadap setiap individu di dalam masyarakat.

Dalam konsep masyarakat, diketahui bahwa pada dasarnya setiap orang itu lahir dalam suatu keluarga, dan pada mulanya individu tersebut tidak mengetahui bahwa dia merupakan anggota dari suatu ketetanggaaan. Akan tetapi, apabila dia mulai dapat berjalan serta dapat bermain, maka dia akan bermain dengan anak-anak tetangga atau beberapa dari antara mereka. Pada tahap ini dia mulai mengetahui beberapa dari anak tetangga yang tinggal berdekatan. Selain itu, dia akan mulai mengetahui dan berkenalan dengan orang-orang dewasa yang menjadi tetangga tersebut. Dengan demikian, dia mulai mengetahui siapa yang tinggal di sebelah sebagai tetangga.

Dalam perkembangan selanjutnya, dia akan mengetahui bahwa dia tinggal dalam suatu kampung atau suatu desa atau juga dalam suatu kota. Kemudian, dia akan mengetahui pula bahwa dia berkediaman di dalam suatu daerah dan pada tahap selanjutnya dia akan mengetahui bahwa dia juga merupakan anggota suatu bangsa atau suatu negara.

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa seseorang itu dapat merupakan anggota dari berbagai kelompok dan kesemuanya mungkin dapat dikategorikan sebagai komunitas. Dengan demikian, suatu komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai 'masyarakat setempat', suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya.

Secara kekuasaan, konsepnya pernah

dijelaskan sebelumnya oleh Max Webber. Kekuasaan menurut Max Webber terbagi menjadi tiga tipe murni. Pertama, tipe kekuasaan karismatik, dimana bentuk hubungan kekuasaan bersumber pada kualitas supranatural pemimpin. Para pengikut bergerak hanya dalam kerangka kepercayaan terhadap kemampuan sang pemimpin tersebut. Kedua, kekuasaan tradisional. Dimana keabsahan bentuk kekuasaan bersumber pada tradisi yang turun-temurun dalam satu dinasti ataupun dalam satu ikatan primordial yang kuat. Tipe kekuasaan ini terbagi lagi menjadi dua, yakni dalam bentuk tradisional primordial dan bentuk feodal. Dalam bentuk tradisional primordial, aparat administratif akan tergantung pada penguasa dalam hal pengupahannya. Sedangkan dalam bentuk feodal, apabila otonomi yang diberikan penguasa kepada yang dikuasai terlihat lebih tinggi. Aparat mempunyai yurisdiksi, kekuasaan administratif yang mandiri namun tetap terikat oleh sumpah ataupun kontrak loyalitas kepada penguasa. Dan tipe kekuasaan yang ketiga adalah tipe kekuasaan legal rasional, dimana keabsahan hubungan kekuasaan bersumber pada ketentuan dan peraturan formal. Bentuk aparat administrasinya adalah birokrasi.

Sultan memiliki ketiga tipe kekuasaan tersebut di Yogyakarta. Namun setiap informan yang diwawancara dapat membentuk pemaknaan yang lebih mengarah kepada salah satu tipe saja. Hal tersebut disebabkan oleh sejauh mana informan tingkat pendidikan informan, terutama di bidang politik. Dan juga disebabkan oleh fenomena-fenomena yang dialami informan sendiri semasa hidupnya di Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan tujuan migrasi, terutama bagi kalangan mahasiswa, karena Yogyakarta adalah kota pelajar yang memiliki 134 perguruan tinggi. Banyaknya kalangan mahasiswa yang masuk ke Yogyakarta juga diimbangi dengan kalangan pengusaha yang ingin mencari peruntungan di daerah ini. Kalangan pengusaha tersebut berusaha memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan mendirikan tempat tinggal seperti kos-kosan, rumah makan, dan masih banyak lagi hal penunjang kehidupan lainnya

Selain itu, Yogyakarta juga disebut sebagai kota wisata. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang menjadikan Yogyakarta sebagai

tujuan wisata favorit, sehingga kalangan pengusaha juga berlomba-lomba mendirikan hotel, dan hal penunjang kebutuhan wisatawan lainnya.

Beragamnya kelompok dari masyarakat pendatang ini membentuk masyarakat yang bersifat pluralistik. Mereka hidup bersama dan membentuk suatu pergaulan hidup. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggotanya. Emile Durkheim mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya (Soleman Taneko, 1993:11). Maka dari itu untuk mendapatkan pemaknaan tentang kesultanan di masyarakat Yogyakarta, perlu digunakan teori fenomenologi agar individu di dalam masyarakat pendatang tersebut dapat membentuk makna secara obyektif.

Berdasarkan data yang didapatkan, pemaknaan dari berbagai kalangan masyarakat pendatang di Yogyakarta ini dapat dikatakan homogen, karena seluruh informan memaknai kesultanan hanyalah sebagai lembaga kebudayaan yang dimiliki oleh sultan, terpisah dari pemerintahan. Namun mereka tetap menganggap sultan sebagai orang yang berkuasa di Yogyakarta, meskipun jika suatu saat sultan tidak menjadi gubernur. Hal ini membuktikan bahwa sultan memang menguasai Yogyakarta dengan kharismanya sebagai salah satu sumber kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Max Webber, sumber kekuasaan yang berupa karisma ini berkaitan dengan watak pribadi yang luar biasa. Seseorang dianggap sah berkuasa jika memiliki watak pribadi yang istimewa seperti kepahlawanan, kesederhanaan, santun, peduli terhadap keadaan, dan sebagainya. Dan hal-hal tersebut ada di dalam sosok sultan yang dilihat oleh masyarakat pendatang.

Pemaknaan masyarakat pendatang terhadap kesultanan ini terbentuk bukan tanpa alasan. Kedekatan hubungan mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesultanan sangat mempengaruhi pemaknaan mereka. Sebagai masyarakat pendatang, mereka mengaku tidak pernah terlibat dalam urusan yang juga ada unsur kesultanan di dalamnya.

Namun ada pemaknaan yang dibentuk oleh masyarakat yang menganggap dirinya sebagai kelompok minoritas karena berasal dari Bali,

bukan Jawa, dan beragama Hindu. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 di Yogyakarta, jumlah masyarakat pendatang yang berasal dari Bali sebanyak 3.455 jiwa ini memang sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendatang yang berasal dari suku Sunda atau Melayu yang masih berjumlah puluhan ribu. Sedangkan pemeluk agama Hindu di Yogyakarta hanya sekitar 0,15% dari jumlah keseluruhan. Dan sebagai kelompok minoritas, dia tidak merasa dipinggirkan, bahkan dia merasa kegiatan ibadahnya diakomodasi dengan baik oleh pemerintah Yogyakarta atau sultan dengan banyaknya pura yang ada disana. Dia memaknai sultan sebagai bapak yang selalu mengajarkan masyarakat Yogyakarta untuk bersikap baik dan penuh toleransi pada masyarakat pendatang.

Hal ini merupakan wujud kekuasaan sultan di masyarakat Yogyakarta. Kekuasaan memang selalu ada di dalam setiap masyarakat baik yang tradisional maupun yang modern, hanya dibagi-bagi sesuai dengan fungsinya, kalau tidak dibagi justru akan timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu secara tirani mampu mempengaruhi semua pihak sesuai kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Di Yogyakarta, bentuk kekuasaan sultan terhadap masyarakatnya adalah bagaimana beliau dapat mempengaruhi masyarakatnya untuk dapat bersikap baik dan penuh toleransi antar sesama sehingga tidak terciptanya konflik antar kelompok.

Di dalam masyarakat, dikenal tentang konsep nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah keyakinan relatif kepada yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah, kepada apa yang seharusnya ada dan apa yang seharusnya tidak ada (Soleman Taneko, 1993: 63). Nilai-nilai memainkan peran yang penting di dalam kehidupan sosial. Kebanyakan hubungan-hubungan sosial didasarkan bukan saja pada fakta-fakta positif, akan tetapi juga pada pertimbangan-pertimbangan nilai (Maurice Duverger, 1982: 13). Maksudnya, nilai-nilai mencerminkan suatu kualitas preferensi dalam tindakan. Nilai-nilai inti memberikan sumbangan yang berarti kepada pembentukan pandangan dunia mereka. Nilai-nilai juga dapat memberikan perasaan identitas kepada masyarakat dan menentukan seperangkat tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, nilai-nilai yang ada merupakan komponen yang

penting dari orientasi-orientasi kognitif dan evaluatif bagi masyarakat di Yogyakarta.

Mengenai nilai manusia terhadap lingkungan sosial atau dalam hubungan dengan sesamanya pada masyarakat Yogyakarta, ada kebudayaan yang sangat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Dalam pola kelakuannya, manusia yang hidup dalam suasana kebudayaan serupa itu akan berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin, seperti sultan. Lain kebudayaan lebih mementingkan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Orang dalam kebudayaan serupa ini akan sangat merasa tergantung kepada sesamanya, dan usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam hidupnya, dibalik kebudayaan serupa ini ada kebudayaan yang sangat mementingkan individualisme, menilai tinggi anggapan bahwa manusia itu harus berdiri sendiri dalam hidupnya dan sedapat mungkin harus mencapai tujuannya dengan sedikit mungkin bantuan orang lain.

Sedangkan norma sosial yang berlaku di Yogyakarta merupakan pedoman atau patokan perilaku itu sebenarnya bersumber dari nilai-nilai, oleh karena pedoman-pedoman perihal perilaku itu didasarkan pada konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang seharusnya dan apa yang buruk. Jadi dapat dinyatakan bahwa norma-norma merupakan wujud konkrit dari nilai-nilai, pedoman mana yang berisikan suatu keharusan, kebolehan, dan suatu larangan. Oleh sebab itu, norma-norma dapat pula disebut sebagai suatu skala yang terdiri dari berbagai kategori tingkah laku. Norma-norma itu dapat juga dianggap sebagai suatu konsep yang menyangkut semua keteraturan sosial yang berhubungan dengan evaluasi dari obyek-obyek, individu-individu, tindakan-tindakan, dan gagasan-gagasan (Saparinah Sadli, 1977:13).

Secara sosiologis, norma-norma sosial itu tumbuh dari proses kemasyarakatan, hasil dari kehidupan bermasyarakat. Individu dilahirkan dalam suatu masyarakat dan disosialisasikan untuk menerima aturan-aturan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, Emile Durkheim menyatakan bahwa norma-norma sosial itu adalah sesuatu yang berada di luar individu, membatasi mereka dan

mengendalikan tingkah laku mereka (David Berry, 1982: 47).

Unsur pokok dari satu norma adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakat Yogyakarta untuk menjalankan norma-norma tersebut. Latar belakang pemikirannya adalah bahwa apabila aturan-aturan yang tidak dikuatkan oleh desakan sosial, maka hal tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai norma-norma sosial. Desakan sosial ini merupakan pertanda bahwa normaitu benar-benar telah menjadi norma sosial, sebab norma disebut sebagai norma sosial bukan saja karena telah mendapatkan sifat kemasyarakatannya, akan tetapi telah dijadikan patokan dalam perilaku.

Keseragaman perilaku dalam kehidupan bersama dapat dipandang sebagai hasil dari keterikatan mereka terhadap norma-norma sosial itu. Maka dari itu, tidak heran jika di Yogyakarta, setiap masyarakatnya memiliki toleransi yang tinggi karena proses penerapan nilai dan norma sosialnya berjalan cukup lancar melalui interaksi.

Pemaknaan yang dibentuk oleh masyarakat Yogyakarta dapat berimplikasi pada keberlangsungan pluralitas masyarakat di Yogyakarta, dan juga pada masa depan Yogyakarta. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana aspirasi warga negaranya adalah kekuatan terbesar negara ini.

Pada dasarnya setiap masyarakat dalam hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu akan dapat diketahui, apabila dilakukan perbandingan, artinya adalah menelaah keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan masa yang lalu.

Secara umum, salah satu faktor perubahan adalah adanya stimulus dari luar. Namun di Yogyakarta, yang terjadi justru sebaliknya. Gagasan-gagasan, ide-ide, atau pengaruh apapun dari luar dapat luntur ketika masyarakat pendatang masuk ke Yogyakarta.

Namun dari pemaknaan-pemaknaan yang ada, terlihat bahwa kekuatan dari luar yang masuk ke dalam Yogyakarta tidak cukup kuat untuk dapat mempengaruhi kebudayaan atau kultur yang ada di dalam masyarakat Yogyakarta. Identitas masyarakat Yogyakarta tetaplah identik dengan keramahan, karena justru masyarakat asli yang akan mempengaruhi masyarakat pendatang dengan

kebudayaan mereka. Sehingga mau tidak mau, masyarakat pendatang akan beradaptasi dengan sendirinya.

Masyarakat adalah pergaulan hidup atau kehidupan bersama manusia yang berdimensi banyak. Perubahan dalam masyarakat, dengan demikian, merupakan perubahan terhadap aspek dari pergaulan hidup atau kehidupan bersama manusia, yang menyangkut kelompok-kelompok, nilai-nilai, norma-norma, institusi (termasuk kesultanan), stratifikasi sosial, dan lain-lain. Di Yogyakarta, nilai dan norma yang ada sangatlah kuat, kelompok-kelompok saling berinteraksi dengan baik karena sultan memang menanamkan pada masyarakatnya untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan stratifikasi sosial di Yogyakarta tidak berbeda jauh secara signifikan karena satu individu dapat tergabung dalam banyak kelompok yang akhirnya saling terhubung.

Hal yang justru ditemukan dari penelitian ini adalah bukan tentang pluralitas masyarakat yang terimplikasi oleh pemaknaan yang mereka ciptakan. Jika ditelaah lebih dalam, justru pluralitas masyarakat itulah yang akan mempengaruhi Yogyakarta. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi di Yogyakarta karena pluralitas masyarakatnya.

Pertama, unsur-unsur budaya seperti bahasa dan adat istiadat, pemahaman dan pemaknaannya akan semakin luntur khususnya di kalangan anak muda asli Yogyakarta begitu juga pendatang yang notabene memiliki budaya yang khas. Mereka ini sudah kesulitan ketika menggunakan bahasa lokalnya masing-masing secara tepat dan benar, mengingat mereka dituntut hidup dalam pergaulan yang lebih 'nasional' agar dapat lebih bersikap ramah ke pendatang. Hal tersebut juga akan terjadi pada pendatang. Mereka akan sedikit melunturkan sifat bawaan etnis mereka ketika tinggal di Yogyakarta. Termasuk dalam hal tata karma, etika bergaul dan corak menjalani aktivitas sehari-hari, tentunya masing-masing etnis memiliki karakter yang beragam. Tapi keragaman itu tidak terdialogkan secara dinamis sehingga etnisitas yang beragam tidak dimaknai sebagai sebuah kekayaan tapi sering dijadikan media untuk mempertegas konflik. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan, Yogyakarta akan menjadi tempat meleburkan segala kebudayaan hanya demi mengurangi konflik meningkatkan toleransi antar

kelompok.

Kedua, realitas lingkungan Yogyakarta yang heterogen ini belum mampu melahirkan dialog budaya yang massif dan dinamis. Dalam komunitas yang beragam seperti kos-kosan misalnya, para penghuni yang beragam itu sangat minim menceritakan, mengenalkan apalagi memperaktekkan budaya masing-masing kepada temannya. Ini menunjukkan betapa masyarakat kita, khususnya generasi muda semakin miskin akan pemahaman budaya dan tradisinya sehingga tidak menimbulkan kebanggaan terhadap kekayaan lokalnya. Dialog yang muncul adalah pembicaraan yang berkisar dalam masalah modernitas, konsumerisme dan gaya hidup yang sedang dijalani. Heterogenitas tidak memunculkan dialektika budaya dan dialog-dialog budaya yang produktif. Sehingga, meskipun memiliki individu yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam, akan tetapi Yogyakarta tidak semakin kaya dengan budaya-budaya lain yang berasal dari luar Yogyakarta.

Ketiga, arus globalisme dan kapitalisme secara nyata menjadi batu sandungan dan sekaligus menghancurkan proses pelestarian nilai-nilai religiusitas dan budaya yang menjadi kunci dalam melahirkan paradigma multikultur ini. Kapitalisme melahirkan sebuah dunia tanpa batas, nasionalisme, agama, dan etnisitas atau kebudayaan. Semua itu lebur dalam sebuah interaksi universal antarbudaya. Masyarakat Yogyakarta, pribumi maupun pendatang, oleh kekuatan kapitalisme akan menanggalkan budaya dan tradisi mereka untuk bersama-sama larut dalam budaya populer, materialistik, individualistik dan gaya hidup lainnya yang selama ini diproduksi oleh kapitalisme. Arus kapitalisme di Yogyakarta tidak hanya melahirkan kepincangan relasi sosial sehingga menimbulkan gejolak sosial seperti pengusuran, tapi lebih dari itu kapitalisme menjadi budaya bahkan ideologi baru bagi masyarakat Jogja sehingga melunturkan identitas Yogyakarta sebagai kota budaya. Pendidikan, agama, nilai-nilai lokal, etika semua terpinggirkan oleh produk kapitalisme. Ironisnya kekuatan pasar dan kapitalisme tersebut mendapat dukungan penuh dari kekuatan birokrasi, pemerintah lebih cenderung memperkuat struktur dan infrastruktur kepentingan kapitalisme daripada berusaha mendialogkan dan melestarikan pluralitas

budaya yang ada di Yogyakarta.

Kemajemukan Yogyakarta seharusnya melakukan penguatan pluralitas masyarakatnya seperti dengan adanya kesiapan struktur-struktur, pranata-pranata, dan organisasi-organisasi sosial, dengan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak, serta pembenahan hukum. Selain itu landasan pengetahuan diperlukan untuk memahami pluralitas, yakni bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya masyarakat pluralistik, antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak azasi manusia, hak budaya komunitas, dan lain-lain.

Meski wujud konkritnya masih terlihat samar-samar, tatanan masyarakat pluralistik yang hendak dituju cenderung mengacu pada suatu tatanan masyarakat yang unsur-unsurnya memiliki ciri yang juga beragam. Hubungan antar unsur yang berbeda itu juga menghilangkan oleh corak hubungan yang dominatif, dan karenanya juga tidak ada ruang untuk bersifat diskriminatif. Perbedaan yang jelas dibandingkan dengan masyarakat pluralistik yaitu adanya interaksi yang aktif di antara unsur-unsurnya melalui proses belajar. Lebih dari itu, kedudukan berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat itu berada dalam posisi yang setara, demi terciptanya keadilan di antara berbagai unsur yang saling berbeda.

Di Yogyakarta, pluralitas tidak hanya dimanifestasikan dalam bentuk toleransi terhadap kebudayaan dan etnisitas yang berlainan dan adanya kebijakan untuk bersikap toleran dan untuk melindungi kebudayaan yang berbeda tersebut. Tapi lebih dari itu masing-masing individu yang berlainan suku itu harus mampu menampilkan karakter dan ciri khas budayanya dalam kehidupan sehari-hari ketika menjalani kehidupan bersama di Yogyakarta. Selain itu, pemerintah seharusnya memacu dan mendukung penuh setiap upaya-upaya penguatan potensi budaya lokal yang diusung dan ditampilkan oleh berbagai macam daerah yang masyarakatnya ada di Yogyakarta.

Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan dan analisis data, secara berturut-turut sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pemaknaan yang diungkapkan oleh masyarakat asli Yogyakarta masih cenderung seragam (homogen). Para informan memaknai sultan sebagai sosok raja yang berkuasa secara kewilayahan maupun secara spiritual. Mereka percaya apapun yang diajarkan oleh sultan adalah kebaikan untuk mereka. Maka dari itu, mereka sangat menerapkan ajaran keraton dalam kehidupan mereka sehari-hari agar tetap merasa aman dan nyaman tinggal di Yogyakarta. Namun ada sedikit perbedaan makna ketika mereka memaknai kesultanan sebagai sebuah institusi. Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang yang mereka miliki, terutama di bidang pendidikan dan politik. Informan yang memiliki latar belakang politik lebih memahami kesultanan yang memang seharusnya terpisah dari pemerintahan secara administrasi karena mempertimbangkan aspek-aspek politik yang akan bersentuhan dengan seorang kepala daerah. Kesultanan sebagai suatu warisan kebudayaan tidak ideal jika suatu saat nanti dicampuri dengan urusan politik, terutama kepartaian dan lain sebagainya. Namun secara keseluruhan, hal itu hanya menjadi sebuah alternatif jika suatu saat ada perubahan yang terjadi di Yogyakarta. Untuk saat ini, masyarakat asli Yogyakarta, termasuk informan yang berprofesi di bidang politik, tetap mempertahankan kesultanan dan pemerintahan yang seperti ini.

Kedua, ketika memaknai eksistensi kesultanan di Yogyakarta, juga ditemukan keseragaman pada pemaknaan yang dibuat oleh masyarakat pendatang. Para informan memaknai sultan sebagai kepala daerah di Yogyakarta yang juga memimpin kebudayaan disana. Mereka juga menganggap kesultanan hanyalah sebuah institusi kebudayaan yang memang harus dilestarikan oleh masyarakat. Kesultanan dalam pemaknaan mereka tidak dianggap sebagai hal yang terkait dengan keyakinan atau kepercayaan, berbeda dengan pemaknaan yang dibentuk oleh masyarakat asli Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kurangnya interaksi atau kedekatan masyarakat pendatang dengan sultan, ataupun institusinya. Selain itu, informan yang berurusan dengan pemerintahan juga memaknai sultan hanya sebagai kepala

daerah, layaknya kepala daerah di daerah asal informan tersebut. Terlebih lagi ketika mereka ditanyakan tentang masa depan pemerintahan Yogyakarta, harapan mereka adalah pemilihan umum kepala daerah, bukan penetapan. Jadi, menurut mereka, sangat ideal jika kesultanan dan pemerintahan adalah dua institusi yang terpisah. Yang satu berfokus pada kebudayaan, dan yang satu lagi benar-benar berfokus pada politik. Namun mereka mengakui bahwa pengaruh kesultanan sangat kuat tercermin pada kehidupan sehari-hari masyarakat asli, sehingga diterimanya masyarakat pendatang dan tingginya tingkat toleransi di Yogyakarta dipercaya sebagai keberhasilan sultan dalam mempengaruhi masyarakat setempat untuk hidup saling berdampingan agar tidak tercipta konflik antar kelompok.

Implikasi dari pemaknaan yang dibentuk oleh masyarakat pluralistik Yogyakarta adalah, Yogyakarta akan tetap menjadi daerah yang nyaman untuk ditinggali karena setiap kelompok yang ada di Yogyakarta memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Namun tingginya tingkat toleransi ini dapat melunturkan budaya asli yang seharusnya dibawa oleh pendatang, juga budaya asli masyarakat setempat. Jadi sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam mewadahi budaya pendatang dan budaya asli Yogyakarta tanpa memicu konflik antar etnis. Selain itu, pluralitas masyarakat yang membawa makna yang fragmented ini menyebabkan banyak harapan yang berbeda untuk masa depan Yogyakarta, terutama dalam hal pemerintahan, yakni kesultanan. Apabila kesadaran politik dan pendidikan masyarakat semakin tinggi, tidak menutup kemungkinan kesultanan tidak akan menempati pemerintahan, melainkan menjadi suatu lembaga yang murni bersifat kebudayaan, tanpa unsur politik. Ada beberapa alternatif atau kemungkinan yang terjadi, yang telah dijelaskan pada bagian akhir bagian pembahasan. Implikasi terakhir adalah meningkatnya jumlah penduduk yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, agar kenyamanan Yogyakarta tetap terjaga.

Saran

Kajian-kajian mengenai pemaknaan, dan pluralitas masyarakat perlu diteliti lebih dalam dengan berbagai aspek sudut pandang yang berbeda pada berbagai kurun waktu dan daerah

yang ada. Atau juga dapat diperbarui pada sisi perspektifnya melalui teori-teori lain yang mendukung, guna memperluas ilmu pengetahuan, khususnya studi tentang eksistensi suatu hal dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki kekuatan dari rakyatnya memang sudah seharusnya lebih berfokus pada ilmu-ilmu tentang masyarakat. Apalagi kondisi masyarakat Indonesia, khususnya Yogyakarta, yang bersifat pluralistik. Pemaknaan yang didapatkan dari masyarakat pluralistik tentu berbeda dengan daerah yang masyarakatnya bersifat homogen. Implikasi dari pemaknaan ini pun akan berbeda pula, baik implikasi bagi daerah itu sendiri maupun bagi Indonesia.

Peneliti mencoba menyarankan, jika ada penelitian yang hamper sama dengan penelitian skripsi ini, agar penelitiannya dapat lebih spesifik dan lebih tajam dalam mendapatkan pemaknaan dari para informan. Sehingga validitas hasil temuan dapat menjadi lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Coward, Harold. 1989. *Pluralisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Drummond, John. 2000. *Phenomenology of the Political*. Netherland: Kluwer Academic Publishers.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margantoro, Y.B. 1999. *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Misiak, Henryk. 2009. *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial, dan Humanistik*. Bandung: Refika Aditama.
- Parekh, Bikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peoespoprodjo. 1987. *Interpretasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Stoker, Gerry. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Taneko, Soleman. 1993. *Struktur dan Proses*

- Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irawan, Ade. 2011. *Jadi Kota Ternyaman di RI, Yogya Kalahkan Jakarta* (Online). (<http://finance.detik.com/read/2011/05/26/154032/1647825/1016/jadi-kota-ternyaman-di-ri-yogya-kalahkan-jakarta>, pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 16.32)
- Sahasrad, Herdi. 2010. *Salam SBY dan Respons Warga Yogya* (Online). (<http://www.inilah.com/read/detail/1026332/salam-sby-respons-warga-yogya>, pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 15.15)
- Mario, Alisman Daeng. 2009. *Keistimewaan Pluralisme Yogyakarta* (Online). (<http://alismario.blogspot.com/p/keistimewaan-pluralisme-yogyakarta.html>, pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 19.23)
- Nugroho, Ito Prajna. 2012. *Fenomenologi Politik: Dari Fenomenologi Husserl dan Heidegger hingga ke Teori Politik Carl Schmitt* (Online). (<http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=1126>, pada tanggal 1 Juni 2012 pukul 20.35)